

ABSTRAK

Febry Agung Riskiyanto

1810111080

Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia melalui kementerian imigrasi menerapkan prinsip *selective policy* yakni kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Melakukan *sweeping* secara digital sangat diperlukan guna mengawasi warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal (*overstay*) di Indonesia. Selain untuk mempermudah Petugas imigrasi dalam mengontrol warga negara asing yang *overstay* dengan adanya *sweeping* digital ini merupakan inovasi berbasis teknologi yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat asli Indonesia. *Sweeping* digital dilakukan dengan cara melalui kanal-kanal media sosial yang ada. Selain petugas keimigrasian, masyarakat pun juga bisa melaporkan dugaan pelanggaran warga negara asing yang *overstay* di Indonesia melalui media sosial imigrasi di wilayah masing-masing. Selain itu, pengawasan terhadap WNA pun juga bisa dilakukan dengan menggunakan QR Code yang tertera pada paspor milik WNA tersebut yang mana ketika petugas menscan QR Code tersebut maka akan muncul data-data dari WNA seperti nama lengkap, kewarganegaraan, foto, rekam sidik jari, serta pergerakan WNA selama di Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisir. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan secara manual saja namun juga bisa dilakukan secara digital. *Sweeping* digital dilakukan dengan cara melalui kanal-kanal media sosial yang ada. Selain petugas keimigrasian, masyarakat pun juga bisa melaporkan dugaan pelanggaran warga negara asing yang *overstay* di Indonesia melalui media sosial imigrasi di wilayah masing-masing. Selain itu, pengawasan terhadap WNA pun juga bisa dilakukan dengan menggunakan QR Code yang tertera pada paspor milik WNA.

Kata Kunci: *Sweeping*, digital, WNA

ABSTRACT

Febry Agung Riskiyanto

1810111080

This research explains that the Indonesian government, through the immigration ministry, applies the principle of selective policy, namely a policy based on selective principles. Supervision of foreigners is not only carried out when they enter, but also while they are in Indonesian territory, including their activities. Immigration supervision includes enforcement of immigration law, both administrative and immigration criminal acts. Carrying out digital sweeping is very necessary to monitor foreign nationals who exceed the residence permit limit (overstay) in Indonesia. Apart from making it easier for immigration officers to control overstaying foreign nationals, digital sweeping is a technology-based innovation that can provide comfort and security for native Indonesians. Digital sweeping is carried out through existing social media channels. Apart from immigration officers, the public can also report alleged violations by foreign nationals who overstay in Indonesia via immigration social media in their respective regions. Apart from that, supervision of foreigners can also be carried out using the QR Code printed on the foreigner's passport, where when the officer scans the QR Code, data from the foreigner will appear such as full name, nationality, photo, fingerprint record, as well as movement of foreigners while in Indonesia.

The conclusion of this research is that supervision of foreigners needs to be further improved in line with the increase in international crime, such as human trafficking, human smuggling, and narcotics crimes which are often carried out by organized international crime syndicates. Supervision of foreigners is not only carried out when they enter, but also while they are in Indonesian territory, including their activities. Surveillance of foreigners is not only done manually but can also be done digitally. Digital sweeping is carried out through existing social media channels. Apart from immigration officers, the public can also report alleged violations by foreign nationals who overstay in Indonesia via immigration social media in their respective regions. Apart from that, supervision of foreigners can also be carried out using the QR Code printed on the foreigner's passport.

Keywords: *Sweeping, digital, foreigners*